



**SOSIALISASI PILKADA LANGSUNG TAHUN 2015 OLEH
KPU KABUPATEN SEMARANG**

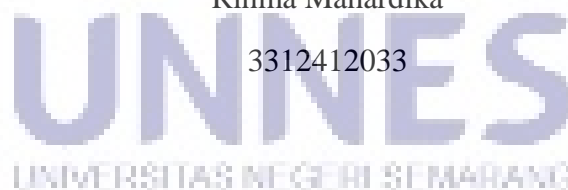
SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Sosial (S.Sos) pada Prodi Ilmu Politik

Oleh:

Rihma Mahardika

3312412033



JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

2016

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui oleh Pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : *Jumat*
Tanggal : *23 September 2016*

Pembimbing Skripsi I

Drs. Setiajid, M.Si.
NIP. 196006231989011001

Pembimbing Skripsi II

Drs. Sunarto, S.H., M.Si.
NIP. 196306121986011002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Drs. Tijan, M.Si.
NIP. 196211201987021001

UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

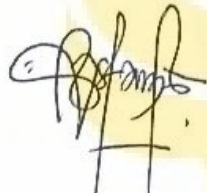
PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Skripsi Jurusan Politik dan Kewarganegaraan Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 27 September 2016

Penguji I



Puji Lestari, S.Pd., M.Si.

NIP. 197707152001122008

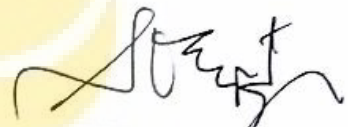
Penguji II



Drs. Setiajid, M.Si.

NIP. 196006231989011001

Penguji III



Drs. Sunarto, S.H., M.Si

NIP. 196306121986011002

Mengetahui/Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang



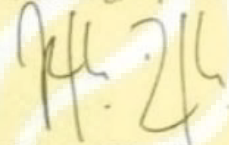
Drs. Moh Solehatul Mustofa, M.A

NIP. 196308021988031001

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat di dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode ilmiah.

Semarang, September 2016



Rihma Mahardika

NIM. 3312412033



UNNES
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

- ❖ “Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya, jika kamu orang-orang yang beriman.” (Q.S. Al-Imran: 139)
- ❖ "Bila kegagalan itu bagai hujan dan keberhasilan bagaikan matahari, maka butuh keduanya untuk melihat pelangi." (Kagome Inuyasha)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Ayah dan Ibu terima kasih atas segala doa dan dukungannya hingga sampai saat ini dan selamanya.
2. Keluarga besar tercinta, terima kasih atas doa serta dukungan hingga saat ini.
3. Semua dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu serta membimbing selama ini.
4. Sahabat serta teman-teman SMA dan angkatan PKN 2012.
5. Almamater UNNES tercinta.

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Sosialisasi Pilkada Langsung Tahun 2015 Oleh KPU Kabupaten Semarang”.

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, dan sumbang saran dari segala pihak, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Negeri Semarang Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum. yang telah memberikan kemudahan administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang Drs. Mohammad Solehatul Mustofa, MA yang telah memberikan izin penelitian.
3. Ketua Jurusan PKn Universitas Negeri Semarang Drs. Tijan, M.Si yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyusunan skripsi.
4. Pembimbing I Drs. Setiajid, M.Si. yang senantiasa membimbing, memberi pengarahan, dan saran-saran dalam penyusunan skripsi.
5. Pembimbing II Drs. Sunarto, S.H, M.Si yang senantiasa membimbing, memberi pengarahan, dan saran-saran dalam penyusunan skripsi.
6. Segenap Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis

7. Seluruh Staf Karyawan Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
8. Divisi sosialisasi, pendidikan pemilih, dan hubungan antar lembaga KPU Kabupaten Semarang Bapak Aris Mufid, ST yang telah memberikan ijin untuk melakukan penelitian serta memberikan info penelitian.
9. Bapak Benny anggota KPU Kabupaten Semarang yang telah membantu mendapatkan data selama kegiatan penelitian.
10. Ketua PPS Kelurahan Genuk Bapak Pardi yang membantu mengarahkan selama kegiatan penelitian.
11. Bapak, Ibu, dan saudara tercinta yang telah memberi doa restu, kasih sayang, semangat, dan dukungan selama ini.
12. Teman-teman SMAN 12 dan teman-teman Prodi Ilmu Politik angkatan 2012 senantiasa membantu dan memberikan dukungan selama ini.
13. Semua masyarakat yang sudah membantu dalam mendapatkan informasi selama kegiatan penelitian.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan perkembangan pendidikan selanjutnya.

Semarang, September 2016

Penulis

SARI

Mahardika, Rihma. 2016. *Sosialisasi Pilkada Langsung Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Semarang*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I: Drs. Setiajied, M.Si., Pembimbing II: Drs. Sunarto, S.H., M.Si. 122 halaman.

Kata Kunci: Sosialisasi, Pilkada Langsung, KPU (Komisi Pemilihan Umum)

Pilkada langsung dikatakan baik saat memiliki jumlah pemilih yang lebih besar. Untuk mencapai jumlah pemilih yang besar dilakukan banyak usaha untuk mencapainya, salah satunya adalah sosialisasi. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pengetahuan serta kepercayaan pada seseorang. KPU melakukan sosialisasi berkaitan dengan pemilihan kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh masyarakat yang bertujuan untuk mengajak masyarakat menggunakan hak pilihnya. Saat partisipasi mengalami peningkatan akan menimbulkan keabsahan pemilu yang menjadi lebih besar.

Permasalahan dalam skripsi ini adalah (1) kegiatan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang dalam rangka sosialisasi Pilkada Langsung Tahun 2015? (2) Apa kendala yang dialami oleh KPU Kabupaten Semarang dalam melakukan sosialisasi Pilkada Langsung tahun 2015? (3) bagaimana efektivitas KPU Kabupaten Semarang dalam melaksanakan sosialisasi yang diberikan pada masyarakat?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan di KPU Kabupaten Semarang dan Kelurahan Genuk. Sumber data penelitian ini adalah Kepala Divisi Sosialisasi KPU Kabupaten Semarang, Ketua PPS Kelurahan Genuk, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Uji validitas data dengan menggunakan metode triangulasi sumber. Teknik analisis data menggunakan analisis interaktif dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kabupaten Semarang membagi sosialisasi menjadi dua, yaitu sosialisasi langsung pada masyarakat yang berguna untuk meningkatkan partisipasi pemilih serta bertujuan untuk menjadikan pemilih memilih sesuai dengan pilihannya. Kemudian ada sosialisasi yang ditujukan pada *stakeholder* terkait, seperti pada pemerintah daerah dan partai politik. Adapun hambatan yang dialami KPU dalam melakukan sosialisasi, diantaranya dana sosialisasi yang tidak dianggarkan dan letak wilayah yang memiliki infrastruktur terbatas. Keefektifan KPU dalam melakukan sosialisasi yaitu jumlah partisipasi masyarakat saat menggunakan hak pilihnya mengalami peningkatan dari tahun-tahun sebelumnya. Namun sosialisasi bukanlah faktor penentu dari tingginya partisipasi masyarakat, ada faktor lain yaitu adanya calon *incumbent*. Namun kedua faktor ini tentunya saling berkaitan untuk meningkatkan partisipasi

masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya. Dan hal ini sudah menjadi nilai tambah bagi KPU Kabupaten Semarang dalam usahanya melakukan sosialisasi.

Melalui penelitian ini saran yang dapat disampaikan: 1) kepada pemerintah, KPU diharapkan dapat mengajukan usulan dana tambahan sosialisasi pada Pemerintah Daerah. Dimaksudkan agar sosialisasi dapat dilakukan menyeluruh, 2) kepada masyarakat, masyarakat diharapkan untuk tidak melakukan golput serta memilih pemimpin sesuai dengan apa yang diketahui, bukan sekedar ikut-ikutan.



DAFTAR ISI

| | |
|--|-------------|
| JUDUL | i |
| PERSETUJUAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN KELULUSAN | iii |
| PERNYATAAN..... | iv |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | v |
| PRAKATA | vi |
| SARI..... | viii |
| DAFTAR ISI..... | x |
| DAFTAR TABEL | xii |
| DAFTAR GAMBAR..... | xiii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xiv |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 5 |
| C. Tujuan Penelitian | 5 |
| D. Manfaat Penelitian | 5 |
| E. Batasan Istilah | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Deskripsi Teoritis | 9 |
| 1. Pilkada..... | 10 |
| 2. Partisipasi Politik Masyarakat..... | 13 |
| 3. Komisi Pemilihan Umum..... | 17 |
| 4. Sosialisasi Politik | 21 |
| 5. Teori Komunikasi | 31 |
| 6. Teori Efektivitas..... | 34 |
| B. Kerangka Berpikir | 36 |

BAB III METODE PENELITIAN

| | |
|---------------------------------|----|
| A. Latar Penelitian | 38 |
| B. Fokus Penelitian | 39 |
| C. Sumber Data..... | 40 |
| D. Teknik Pengumpulan Data..... | 41 |
| E. Uji Validitas Data..... | 44 |
| F. Teknik Analisis Data..... | 46 |

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|---|-----|
| A. Gambaran Umum Objek Penelitian | 48 |
| 1. Gambaran Umum Kabupaten Semarang..... | 48 |
| a. Sejarah..... | 48 |
| b. Geografis | 49 |
| 2. Gambaran Umum Pilkada Tahun 2015 Kabupaten Semarang | 51 |
| a. Profil Pasangan Calon Bupati Kabupaten Semarang 2015 | 51 |
| 3. Profil KPU Kabupaten Semarang | 60 |
| B. Hasil Penelitian | 62 |
| 1. Kegiatan Sosialisasi Pilkada KPU Kabupaten Semarang 2015 | 62 |
| a. Sosialisasi Langsung pada Masyarakat | 63 |
| b. Sosialisasi pada <i>Stakeholder</i> terkait | 82 |
| c. Evaluasi Pilkada | 86 |
| 2. Kendala Sosialisasi KPU pada Pilkada 2015 | 88 |
| a. Kendala-kendala KPU..... | 88 |
| 1) Dana Sosialisasi yang tidak dianggarkan..... | 89 |
| 2) Letak Wilayah yang memiliki infrastruktur terbatas | 90 |
| 3. Keefektifan Sosialisasi Pilkada Langsung 2015 | 94 |
| a. Perbandingan dengan Tahun Sebelumnya | 94 |
| b. Keefektifan Anggaran Kegiatan Pemilihan Bupati Semarang... .. | 102 |
| C. Pembahasan..... | 104 |
| 1. Kegiatan Sosialisasi Pilkada KPU Kabupaten Semarang | 104 |
| 2. Hambatan Sosialisasi Pilkada KPU Kabupaten Semarang | 111 |
| 3. Keefektifan Sosialisasi Pilkada KPU Kabupaten Semarang | 112 |

BAB V PENUTUP

| | |
|-------------------|-----|
| A. Simpulan | 118 |
| B. Saran..... | 121 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1. Informan Utama dan Informan Pendukung Wawancara | 42 |
| Tabel 2. Kegiatan Sosialisasi KPU Kepada Masyarakat | 64 |
| Table 3. Realisasi Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati Semarang 2015 | 90 |
| Table 4. Daftar Pemilih Tetap Pilkada tahun 2005 | 96 |
| Table 5. Daftar Pemilih Tetap Pilkada tahun 2010 | 97 |
| Table 6. Daftar Pemilih Tetap Pilkada tahun 2015 | 98 |



DAFTAR GAMBAR

| | |
|--|----|
| Gambar 1. Model Analisis Data Model Interaktif milles dan Huberman | 47 |
| Gambar 2. Pasangan Calon Nomor Urut 1 Mundjirin dan Ngesti Nugraha | 52 |
| Gambar 3. Pasangan Calon Nomor Urut 2 Nur Jatmiko dan Mas'ud Ridwan .. | 57 |
| Gambar 4. Sosialisasi Pemilih Pemula di SMK NU Ungaran | 70 |
| Gambar 5. Media Sosialisasi yang digunakan untuk Poster dan Baliho..... | 73 |
| Gambar 6. Media Sosialisasi KPU Kabupaten Semarang | 78 |
| Gambar 7. Kegiatan Sosialisasi dalam Karnaval 17 Agustus 2015 | 80 |
| Gambar 8. Presentase Pemilih Pilkada Sah | 95 |



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Izin Survey Awal di KPU Kabupaten Semarang
- Lampiran 2. Surat Izin Penelitian Ketua PPS Kelurahan Genuk
- Lampiran 3. Surat Izin Penelitian Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Semarang
- Lampiran 4. Surat Rekomendasi Penelitian Kesbangpol
- Lampiran 5. Surat Permohonan Pengambilan Data KPU
- Lampiran 6. Surat Keputusan Pengangkatan Anggota KPPS Kelurahan Genuk
- Lampiran 7. Undangan Rapat Pleno DPT Kelurahan Genuk
- Lampiran 8. Daftar Informan Wawancara
- Lampiran 9. Instrumen Penelitian
- Lampiran 10. Pedoman Wawancara
- Lampiran 11. Persiapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati Semarang 2015
- Lampiran 12. Realisasi Kegiatan Sosialisasi Pemilihan Bupati Semarang 2015
- Lampiran 13. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kampanye 2015
- Lampiran 14. Realisasi Anggaran Kegiatan Evaluasi dan Dokumentasi Hasil 2015
- Lampiran 15. Media Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015
- Lampiran 16. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi Pilkada Tahun 2015

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu wujud partisipasi rakyat dalam proses politik adalah pemilihan umum. Pemilu merupakan sarana bagi rakyat untuk ikut menentukan pemimpin dan arah kepemimpinan negara dalam periode waktu tertentu. Pemilihan umum selalu menjadi indikator utama adanya demokrasi di suatu negara. Peraturan KPU No. 11 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menjelaskan bahwa KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemudian peran KPU dalam sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Berbagai aspek yang harus disosialisasikan kepada masyarakat pemilih berkaitan dengan pemilu diantaranya yaitu: manfaat pemilu, nama-nama peserta pemilu, ajakan untuk memberikan suara nanti pada saat pemungutan suara, tata cara pemilu, jadwal pemilu, khususnya pada tahap kampanye, tata cara pencoblosan, jadwal pemungutan suara dan pengumuman hasil penghitungan suara. Pesan-pesan dalam kegiatan sosialisasi perlu dilakukan secara menarik, informatif, sederhana, dan

mudah dipahami. Media sosialisasi dapat dilakukan dalam bentuk simulasi pencoblosan, ataupun dengan memasang iklan layanan masyarakat di media cetak dan elektronik, iklan *outdoor* (di luar ruangan) dengan memasang spanduk dan baliho di tempat-tempat strategis, penyebaran brosur, stiker, dan sebagainya. Untuk melaksanakan sosialisasi pemilu, KPU berpegang pada Kode Etik Pelaksana Pemilihan Umum. Agar hasil kerjanya dipercayai publik, maka dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya para pelaksana pemilihan umum harus bertindak independen, nonpartisan, dan tidak memihak.

Telah dijelaskan pula dalam UU Pemilukada Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 pasal 13 yang menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diantaranya melaksanakan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. KPU sangat memiliki peran besar sebagai agen sosialisasi kepada masyarakat, dari KPU daerah ini yang lebih mengerti bagaimana seluk beluk daerahnya masing-masing (UU Pemilukada No. 8 tahun 2015).

Sosialisasi politik, khususnya tentang pemilu sangat penting dilakukan agar penyelenggaraan Pemilu dari waktu ke waktu semakin berkualitas. Bagaimanapun juga pemilu telah menjadi harga mati sebagai mekanisme untuk menghasilkan pemerintahan yang demokratis.

Sosialisasi politik yang berhasil dengan baik dengan sendirinya akan mendukung pemilu menjadi lebih baik.

Dengan adanya sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang ini diharapkan akan meningkatkan partisipasi masyarakat serta kesadaran politik masyarakat untuk kebaikan suatu negara. Sosialisasi yang diberikan ini juga diharapkan dapat dilakukan dengan gencar serta lebih mendalam pada desa-desa yang kurang pengetahuan politiknya. Pentingnya sosialisasi politik juga harus diterapkan pada pemilih pemula, seperti melakukan sosialisasi di SMA maupun SMK yang memiliki pemilih-pemilih pemula yang suaranya juga penting untuk menciptakan suatu perubahan. Sosialisasi juga diterima oleh *stakeholder* terkait seperti partai politik serta pemda. Sebagai daerah yang juga mengikuti Pilkada langsung, Kabupaten Semarang mempersiapkan banyak hal untuk menyambut pesta demokrasi ini, antara lain pengamanan oleh aparat keamanan dari POLRI hingga TNI ikut dalam mengamankan Pilkada Serentak tahun 2015.

Pada setiap pemilihan jumlah masyarakat yang memilih di Kabupaten Semarang selalu mengalami peningkatan walaupun hanya sedikit, namun dari banyaknya peningkatan itu masih banyak masyarakat yang golput dengan berbagai alasan. Dari data yang ada pada pilkada Kabupaten Semarang tahun 2005, tingkat partisipasi pemilih hanya 60,77%. Sedangkan pada pilkada tahun 2010, angka partisipasi masyarakat menjadi 62,41%. Saat itu jumlah 735.418 pemilih yang tercatat dalam

DPT maupun DPTb, yang menggunakan hak pilihnya hanya 459.018 suara. Tingkat partisipasi warga Kabupaten Semarang dalam pilkada lalu mencapai 70,08%. Partisipasi pemilih pada pilkada pada tahun 2015 mengalami peningkatan 7,67% dari Pilkada di tahun sebelumnya. Dari 740.771 pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun DPT Tambahan (DPTb), sebanyak 519.127 pemilih datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya (www.kpu.semarangkab.go.id/di unduh: 15 Desember 2015).

Dengan dilakukan sosialisasi, KPU berharap agar masyarakat yang golput dapat berkurang serta masyarakat yang kurang paham dengan Pilkada dijadikan lebih paham dengan Pilkada dan masyarakat tidak hanya diajak memilih, namun dapat menjadi pemilih yang cerdas untuk memilih berdasarkan hati nurani.

Peneliti mengambil judul ini karena masih banyaknya masyarakat golput walaupun setiap tahun jumlah partisipasi masyarakatnya meningkat, namun jumlah golput dengan masalah yang sama harus ditindak lanjuti dengan cara sosialisasi yang gencar dan tentunya sosialisasi tersebut dapat dimengerti oleh masyarakat pada umumnya. Sehubungan dengan hal ini, maka dipandang perlu untuk meneliti bagaimana sosialisasi dari KPU pada Pilkada Langsung tahun 2015 dengan judul **“Sosialisasi Pilkada Langsung Tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Semarang”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka dapat ditentukan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Kegiatan apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang dalam rangka sosialisasi Pilkada Langsung tahun 2015?
2. Apa kendala yang dialami oleh KPU Kabupaten Semarang dalam melaksanakan sosialisasi Pilkada Langsung tahun 2015?
3. Bagaimanakah efektivitas KPU Kabupaten Semarang dalam melaksanakan sosialisasi yang diberikan pada masyarakat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan diatas maka dapat ditentukan rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah:

1. Mengetahui kegiatan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang dalam rangka sosialisasi Pilkada Langsung Tahun 2015.
2. Mengetahui hambatan yang dialami KPU dalam melakukan sosialisasi Pilkada Langsung tahun 2015 di Kabupaten Semarang.
3. Mengetahui efektivitas yang dicapai oleh KPU dalam melakukan sosialisasi Pilkada Langsung Tahun 2015 di Kabupaten Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, dapat berguna sebagai sumbangan bagi dunia pendidikan terutama tentang

kinerja lembaga dalam melaksanakan sosialisasi serta memberikan wawasan tambahan bagi penulis dan pembaca.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis, Menambah wawasan bagi penulis mengenai kinerja lembaga untuk selanjutnya dijadikan sebagai acuan dalam memahami serta proses sosialisasi dalam pemilihan.
- b. Bagi pemerintah, sebagai salah satu referensi dalam melakukan sosialisasi politik untuk meminimalkan masyarakat golput.
- c. Bagi Masyarakat, memberikan wawasan mengenai pentingnya kesadaran politik yang dibantu melalui proses sosialisasi politik.

E. Batasan Istilah

Dari identifikasi masalah, maka perlu diadakan pembatasan masalah yang berkaitan dengan penelitian ini. Hal ini dilakukan agar pengkajian dalam penelitian ini tidak terlampau jauh terhadap apa yang akan disimpulkan. Batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari beberapa pendapat. Beberapa batasan istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Sosialisasi politik, bertujuan memberikan pendidikan politik yang membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas yang dengannya individu dapat memainkan peran dalam kehidupan politik

masyarakatnya, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk menentukan sarana terbaik untuk mewujudkannya (Prihatmoko, 2003: 180).

Yang dimaksud sosialisasi dalam penelitian ini adalah kegiatan sosialisasi tentang Pilkada Langsung tahun 2015 yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang melalui pendidikan politik dan kegiatan rapat koordinasi lembaga KPU meliputi sosialisasi penyusunan daftar pemilih, pemutakhiran daftar pemilih, pendaftaran pasangan calon, penetapan pasangan calon, sosialisasi kampanye, dan sosialisasi pemungutan suara.

2. KPU, dalam pengertiannya merupakan lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang. Sedangkan KPU Kabupaten/kota adalah lembaga penyelenggara pemilu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilukada tahun 2015 (UU Pemilukada No. 8 Tahun 2015).

Yang dimaksud KPU dalam penelitian ini adalah tugas KPU Kabupaten Semarang sebagai Lembaga Penyelenggara pemilihan

Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang dalam Pilkada Langsung tahun 2015.

3. Pilkada, Didalam UU Pemilukada No. 8 Tahun 2015 menjelaskan bahwa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Pilkada yang dimaksud adalah pemilihan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten/Kota. Yang dimaksud Pilkada dalam penelitian ini adalah pemilihan umum untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Semarang tahun 2015 secara langsung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Deskripsi Teoretis

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang diselenggarakan pada 9 Desember 2015 adalah tahap pertama dari rangkaian Pilkada serentak yang akan dilakukan hingga tahun 2023, sebelum dapat diselenggarakan Pilkada serentak secara nasional dilakukan pada satu waktu untuk seluruh daerah pada tahun 2027. Sebelum mengenal pemilihan kepada daerah secara langsung, yang untuk pertama sekali dilaksanakan pada bulan Juni 2005 (UU Nomor 32 Tahun 2004).

Wacana Pilkada dilakukan serentak secara nasional mengemuka akibat mahalanya pembiayaan (anggaran) maupun waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan pemilihan jika dilakukan dalam waktu yang berbeda-beda di setiap daerah. Pasal 3 ayat 1 Perppu No. 1/2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang telah diperkuat menjadi undang-undang (**UU Nomor 1 Tahun 2015**) juga telah menyatakan pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Meskipun demikian, perbedaan-perbedaan waktu Pilkada yang telah berlangsung di seluruh Indonesia sejak 2005 membuat Pilkada serentak secara nasional (dilaksanakan bersamaan di seluruh wilayah NKRI) tidak mungkin dilaksanakan pada waktu dekat. Pelaksanaan Pilkada serentak harus dilakukan secara bertahap. Ada lima tahap Pilkada serentak yang

telah diagendakan oleh KPU untuk menuju pelaksanaan Pilkada serentak secara nasional. Tahap pertama terdiri dari 3 gelombang yang akan diselenggarakan pada Desember 2015, Februari 2017, dan Juni 2018. Tahap Kedua akan diselenggarakan pada tahun 2020, Tahap Ketiga pada tahun 2022, dan Tahap Keempat pada tahun 2023. Baru pada tahun 2027 diperkirakan dapat dilaksanakan Pilkada serentak yang dilakukan di seluruh wilayah NKRI. Pada saat ini masyarakat memiliki empat momentum pemilu, yaitu pemilu legislatif, pemilu presiden dan wakil presiden, pemilu gubernur, serta pemilu Bupati/Walikota. Di beberapa daerah, pelaksanaan pemilu Gubernur dan pemilu Bupati/Walikota telah ada yang dilakukan secara serentak, karena akhir masa jabatan mereka hampir bersamaan (Gaffar, 2012: 70).

1. Pilkada

Menurut Gaffar (2012: 70) dari sisi pelaksanaan, pada saat ini masyarakat memiliki empat momentum pemilu, yaitu pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur, serta Pemilu Bupati/Walikota. Di beberapa daerah, pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati/Walikota telah ada yang dilakukan secara serentak, karena akhir masa jabatan mereka hampir bersamaan. Banyak keuntungan dari dilaksanakannya pilkada serentak ini.

Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pemilukada) secara langsung merupakan penjabaran ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat yang menyatakan bahwa Gubernur,

Bupati, dan Walikota, masing-masing sebagai kepala pemerintahan Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis. Cara demokratis itu diterjemahkan dengan pemberian ruang gerak kepada rakyat pemilih untuk menjadi penentu kandidat yang bakal memimpin daerahnya, Kepala Daerah mesti dipilih langsung dengan rakyatlah yang menjadi pemegang dan pemberi mandate (Rozali Abdullah dalam Hoesein 2015: 148)

Tujuan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak supaya tercipta efektivitas dan efisiensi anggaran. Penghematan anggaran muncul pada saat KPU membiayai honor petugas TPS. Jika pemilihan Gubernur yang berbarengan dengan pemilihan Bupati atau Walikota, pembiayaan atas petugas TPS hanya perlu dibayarkan satu kali termasuk biaya bimbingan teknis, biaya sosialisasi, dan biaya-biaya lain untuk pembiayaan satu kali pemilihan. Hal-hal yang bisa dihemat adalah, pembiayaan honorarium petugas, jadi petugas di TPS itu sekali kerja mereka mengerjakan dua hal, proses rekapitulasi pemilihan gubernur, proses pemungutan dan penghitungan suara bupati, walikota. Honor petugas TPS hanya satu kali saja. Perlu mendapat perhatian, mengingat jadwal tahapan pemilihan yang dilaksanakan melewati tahun anggaran berjalan, perlu dijamin kesinambungan pendanaan kegiatan pemilihan yang dilaksanakan pada tahun anggaran berikutnya. Karena dalam undang-undang disebutkan apabila tahapan selesai tahun 2016 maka anggaran pun juga harus disiapkan di 2015 dan 2016 (<http://www.kpu.go.id/> di unduh 14 Desember 2015).

Pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung membutuhkan biaya yang sangat besar baik dari sisi penyelenggara ataupun dari sisi pasangan calon. Jika berbicara tentang efektivitas pemilihan kepala daerah secara langsung, tentunya akan sulit bagi kita untuk menjawab bahwa sistem pemilihan kepala daerah secara langsung merupakan sistem rekrutmen kepala daerah paling efektif. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat besar yang membebani anggaran negara dan pasangan calon. ongkos politik yang dikeluarkan oleh pasangan kepala daerah diyakini berkolerasi positif dengan maraknya kasus yang melilit kepala daerah hingga di antara mereka ada yang menjadi tersangka bahkan tidak sedikit yang sudah berkekuatan hukum yang tetap.

Menurut Hollyson dan Sri Sundari (Hollyson 2015: 131) pada prinsipnya kedua sistem pemilihan kepala daerah, baik pemilihan langsung ataupun pemilihan melalui DPRD merupakan wujud dari penerapan demokrasi. Jika kita merujuk kepada sila ke-4 Pancasila ini tidak ada yang salah dengan penerapan pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Demikian juga dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Jika kita tinjau dari aturan yang berlaku, tentu juga tidak ada yang salah dengan penerapan sistem pemilihan langsung. Karena yang masih jadi pertanyaan adalah sistem mana yang paling tepat dilaksanakan untuk kondisi bangsa kita saat ini.

Pilkada (Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung) sudah terjadi di ratusan tempat diseluruh Indonesia. Namun, ada gejala mencolok yang cukup mengkhawatirkan yang terjadi dalam masyarakat. Antusiasime publik dan tingkat partsipasi masyarakat luas dalam pilkada itu cukup rendah. Ukuran paling mencolok dari rendahnya keterlibatan publik itu adalah rendahnya tingkat *Voter Turnout* (partisipasi pemilih yang mencoblos di TPS pada hari pemilihan).

2. Komisi Pemilihan Umum

Dalam UU Pemilukada UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 pasal 13 yang menjelaskan bahwa KPU Kabupaten/Kota memiliki tugas dan wewenang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diantaranya melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. KPU sangat memiliki peran besar sebagai agen sosialisasi kepada masyarakat.

Maswadi (2008: 15) mengemukakan bahwa tugas dan wewenang KPU diantaranya adalah merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan pemilihan umum, menerima, meneliti dan menetapkan partai-partai politik yang berhak sebagai peserta pemilihan umum, membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat Pusat sampai di Tempat Pemungutan Suara yang selanjutnya disebut TPS; menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan;

menetapkan keseluruhan hasil pemilihan umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II, Bupati/Walikota, Gubernur dan Presiden, mengumpulkan dan mensistемasikan bahan-bahan serta data hasil pemilihan umum; memimpin tahapan kegiatan pemilihan umum, dan melaksanakan sosialisasi mengenai penyelenggaraan pemilu dan atau yang berkenaan dengan tugas dan wewenang KPU kepada masyarakat.

Menurut Gaffar (2012: 70) dari sisi pelaksanaan, pada saat ini masyarakat memiliki empat momentum pemilu, yaitu pemilu legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur, serta Pemilu Bupati/Walikota. Di beberapa daerah, pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Pemilu Bupati/Walikota telah ada yang dilakukan secara serentak, karena akhir masa jabatan mereka hampir bersamaan. Banyak keuntungan dari dilaksanakannya pilkada serentak ini. Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Arief Budiman menjelaskan bahwa tujuan dilaksanakannya pemilihan kepala daerah serentak supaya tercipta efektivitas dan efisiensi anggaran.

KPU (Komisi Pemilihan Umum) mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut (www.kpu.go.id/ di unduh 15 Desember 2015). Dalam Pasal 10 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum dan Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Komisi Pemilihan Umum dan Penetapan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Umum Komisi Pemilihan Umum, dijelaskan bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum, KPU mempunyai tugas

kewenangan sebagai berikut: merencanakan dan mempersiapkan pelaksanaan Pemilihan Umum; menerima, meneliti dan menetapkan Partai-partai Politik yang berhak sebagai peserta Pemilihan Umum; membentuk Panitia Pemilihan Indonesia yang selanjutnya disebut PPI dan mengkoordinasikan kegiatan Pemilihan Umum mulai dari tingkat pusat sampai di tempat pemungutan suara yang selanjutnya disebut TPS; menetapkan jumlah kursi anggota DPR, DPRD I dan DPRD II untuk setiap daerah pemilihan; menetapkan keseluruhan hasil Pemilihan Umum di semua daerah pemilihan untuk DPR, DPRD I dan DPRD II; mengumpulkan dan mensistematiskan bahan-bahan serta data hasil Pemilihan Umum; memimpin tahapan kegiatan Pemilihan Umum.

Dalam Pasal 2 Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1999 terdapat tambahan huruf:

1) tugas dan kewenangan lainnya yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum.

Sedangkan dalam Pasal 11 Undang-undang Nomor 3 Tahun 1999 tersebut juga ditambahkan, bahwa selain tugas dan kewenangan KPU sebagai dimaksud dalam Pasal 10, selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun setelah Pemilihan Umum dilaksanakan, KPU mengevaluasi sistem Pemilihan Umum. Dalam pilkada serentak tahun 2015, peran KPUD sangatlah penting dalam menentukan partisipasi masyarakat. Dijelaskan pengertian dari KPUD dalam Undang-Undang Pemilukada Nomor 8 tahun

2015, KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Dalam Undang-Undang Pemilukada Nomor 8 tahun 2015 sudah dijelaskan bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota salah satunya adalah melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat. Sosialisasi yang dilakukan KPU berpengaruh besar pada tingkat partisipasi politik masyarakat. KPU Kabupaten Semarang juga memiliki visi dan misi sebagai berikut (<http://kpu.semarangkab.go.id/> di unduh 14 Desember 2015).

1) Visi

Terwujudnya Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki integritas, professional, mandiri, transparan dan akuntabel demi terciptanya demokrasi Indonesia yang berkualitas berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2) Misi

- a) Membantu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum;
- b) Menyelenggarakan Pemilihan Umum untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, akuntabel, edukatif dan beradab;
- c) Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilihan Umum yang bersih, efisien dan efektif;
- d) Melayani dan memperlakukan setiap peserta Pemilihan Umum secara adil dan setara, serta menegakkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e) Meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam Pemilihan Umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis.

3. Partisipasi Politik Masyarakat

Partisipasi politik masyarakat merupakan salah satu bentuk aktualisasi dari proses demokratisasi. Keinginan ini menjadi sangat penting bagi masyarakat dalam proses pembangunan politik bagi negara-negara berkembang seperti di Indonesia, karena di dalamnya ada hak dan kewajiban masyarakat yang dapat dilakukan salah satunya adalah

berlangsung dimana proses pemilihan kepala negara sampai dengan pemilihan walikota dan bupati dilakukan secara langsung. Sistem ini membuka ruang dan membawa masyarakat untuk terlibat langsung dalam proses tersebut.

Budiardjo (2008: 367) menyatakan partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pimpinan Negara dan, secara langsung atau tidak langsung, memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Sedangkan menurut Herbert McClosky dalam *International encyclopedia of the social sciences* (dalam Budiardjo, 2008: 183) partisipasi politik adalah kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung dalam proses pembentukan kebijakan umum. Dengan demikian partisipasi politik erat kaitannya dengan kesadaran politik, karena semakin sadar bahwa dirinya diperintah, orang kemudian menuntut diberikan hak bersuara dalam penyelenggaraan pemerintah.

Nimmo (2000: 162-172) mengemukakan empat tipe dalam pemberian suara dalam pemilihan umum, yaitu: 1) tipe rasional; 2) tipe reaktif; 3) tipe responsif; dan 4) tipe aktif. Penjelasan keempat tipe tersebut disajikan berdasarkan pemaparan Nimmo sebagai berikut: tipe rasional adalah pemberi suara yang rasional, yang sesungguhnya merupakan aksional diri, yaitu sikap yang intrinstik pada setiap karakter

personal pemberi suara yang turut memutuskan pemberian suara kepada kebanyakan warga negara. Orang yang rasional: 1) selalu dapat mengambil keputusan bila dihadapkan pada alternatif; 2) memilih alternatif-alternatif secara sadar; 3) menyusun alternatif-alternatif dengan cara transitif; 4) selalu memilih alternatif yang peringkat preferensinya paling tinggi; dan 5) selalu mengambil putusan yang sama bila dihadapkan pada alternatif-alternatif yang sama. Pemberi suara rasional berminat secara aktif terhadap politik, rajin berdiskusi dan mencari informasi politik, serta bertindak berdasarkan prinsip yang tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan umum. Demikian juga pemberi suara rasional mampu bertindak secara konsisten dalam menghadapi tekanan dan kekuatan politik.

Tipe reaktif adalah pemberi suara yang memiliki ketertarikan emosional dengan partai politik. Ikatan emosional kepada partai sebagai identifikasi partai, yakni sebagai sumber utama aksi-diri dan pemberi suara reaktif. Identifikasi dengan partai meningkatkan citra yang lebih menguntungkan tentang catatan dan pengalamannya, kemampuan dan atribut personalnya. Dengan demikian, identifikasi dengan partai meningkatkan tabir perseptual sehingga individu dapat melihat keuntungan bagi orientasi kepartaiannya. Semakin kuat ikatan partai itu, semakin dibesar-besarkan proses seleksi dan distorsi persepsinya.

Tipe responsif adalah pemberi suara yang mudah berubah dengan mengikuti waktu, peristiwa politik dan kondisi-kondisi sesaat. Meskipun

memiliki kesetiaan kepada partai, tetapi afiliasi itu ternyata tidak memengaruhi perilakunya dalam pemberian suara. Hubungan dengan partai lebih rasional ketimbang emosional. Pemberi suara yang responsif lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor jangka pendek yang penting dalam pemilihan umum tertentu, disbanding oleh kesetiaan jangka panjang kepada kelompok atau kepada partai.

Tipe aktif adalah pemberi suara yang terlibat aktif dalam menginterpretasikan peristiwa, isu, partai, dan personalitas, dengan menetapkan dan menyusun maupun menerima, serangkaian pilihan yang diberikan. Para pemberi suara merumuskan citra politik tentang apa yang diperhitungkan oleh mereka dengan berbagai varian.

Selain itu Arifin (2010: 109) menemukan di lapangan, adanya satu tipe lagi, yaitu tipe transaksional, yaitu individu-individu yang mengambil keputusan dari sejumlah opsi, berdasarkan transaksi, berupa hadiah atau fasilitas. Meskipun simpatisan atau anggota dalam satu partai, ia dapat memilih kandidat dari partai lain, berdasarkan transaksi yang dikenal sebagai aplikasi dari “politik uang” (*money politics*) yang berlangsung dalam “pasar gelap” (*black market*) politik. Tipe ini ternyata jumlahnya sangat banyak di Indonesia, bukan saja bisa terjadi dikalangan elit, tetapi juga dikalangan orang banyak terutama dari kalangan orang-orang miskin dan kurang pendidikan, seperti para penganggur, preman, pengamen dan banyak lagi.

Menurut Maran (2001: 147) partisipasi dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun kiranya perlu juga di catat bahwa partisipasi politik pun berpengaruh terhadap sosialisasi politik. Tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tak dapat berjalan.

4. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik dan partisipasi politik merupakan suatu konsep yang berkaitan satu sama lain. Menurut Maran (Maran, 2001: 135) yang dimaksud dengan sosialisasi politik adalah suatu proses yang memungkinkan seseorang individu bisa mengenali sistem politik, yang kemudian menentukan sifat persepsi-persepsinya mengenai politik serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Berkaitan dengan partisipasi politik yang memiliki keterlibatan individu pada berbagai tingkatan dalam suatu sistem politik.

Di dalam kehidupan politik, seperti halnya dalam wilayah-wilayah kehidupan lain, sosialisasi merupakan suatu kunci bagi perilaku. Sosialisasi politik merupakan suatu proses bagaimana memperkenalkan sistem politik pada seseorang, dan bagaimana orang tersebut menentukan tanggapan serta reaksi-reaksinya terhadap gejala-gejala politik. Melalui sosialisasi politik, individu-individu diharapkan mau dan mampu berpartisipasi secara bertanggung jawab dalam kehidupan politik. Dalam hal ini sosialisasi merupakan suatu proses pedagogis (proses pendidikan), atau suatu proses pembudayaan insan-insan politik.

Prihatmoko (2003: 180) mengemukakan bahwa sosialisasi politik bertujuan memberikan pendidikan politik yang membentuk dan menumbuhkan kepribadian politik dan kesadaran politik, serta partisipasi politik rakyat. Pendidikan politik menjadi sangat penting untuk menumbuhkan budaya demokratis di masyarakat. Lebih lanjut dikatakan bahwa partisipasi politik adalah aktivitas yang dengannya individu dapat memainkan peran dalam kehidupan politik masyarakatnya, sehingga ia mempunyai kesempatan untuk menentukan sarana terbaik untuk mewujudkannya. Giddens mengingatkan bahwa setiap individu dan masyarakat adalah agen yang mereproduksi struktur sosial dan mengarah pada perubahan sosial (Arisandi, 2015: 200).

Sosialisasi politik dijalankan melalui bermacam-macam lembaga, beberapa diantaranya, seperti pelajaran kewarganegaraan di sekolah-sekolah yang sengaja dirancang demi tujuan sosialisasi politik, di samping juga untuk tujuan lain. Hal tersebut berbeda dengan kelompok pergaulan dan pekerjaan, yang cenderung untuk memengaruhi sosialisasi politik secara tidak langsung. Dengan mengutip pendapat Almond (Mochtar Mas'ood dan Mac Andrew, 2005 dalam Sahid 2011: 202), beberapa lembaga atau agen sosialisasi politik secara lengkap dapat diuraikan sebagai berikut.

- a. Keluarga, pengaruh kehidupan keluarga baik yang langsung maupun tidak langsung sebagai lembaga sosialisasi pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal. Pengaruh yang paling jelas dari keluarga ini adalah

dalam hal pembentukan sikap terhadap wewenang kekuasaan. Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga memberi kecakapan-kecakapan kepada si anak untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin dalam berpartisipasi secara aktif dalam system politik sesudah menjadi dewasa.

- b. Sekolah, orang terpelajar lebih sadar terpengaruh perintah dalam kehidupan mereka, lebih memperhatikan kehidupan politik, lebih banyak memperoleh informasi tentang proses-proses politik, dan lebih kompeten dalam tingkah laku politiknya. Sekolah memberikan pengertian kepada kaum muda tentang dunia politik dan peranan mereka di dalamnya.
- c. Kelompok pergaulan, meskipun sekolah dan keluarga merupakan sarana yang paling jelas dalam proses sosialisasi, ada juga beberapa unit sosial lain yang bisa membentuk sikap-sikap politik seseorang. Dalam hal ini, individu-individu tersebut mengubah kepentingan dan tingkah lakunya agar sesuai dengan kelompoknya sebagai usaha ia tetap diterima oleh anggota-anggota kelompok kelompok itu.
- d. Pekerjaan, pekerjaan dan organisasi-organisasi formal maupun nonformal yang dibentuk berdasarkan lingkungan pekerjaan itu, seperti serikat buruh, klub sosial dan semacam itu juga merupakan saluran komunikasi informasi dan keyakinan yang jelas. Individu mengidentifikasi dengan suatu kelompok tertentu, seperti serikat buruh, dan menggunakan kelompok itu sebagai penyuluh dalam kehidupan politik.

- e. Media massa, masyarakat modern tidak dapat hidup tanpa komunikasi yang luas, cepat, dan secara umum seragam. Kita tahu bahwa media massa, surat kabar, radio, televisi, majalah memegang peranan penting dalam menularkan sikap dan nilai modern kepada bangsa mereka, termasuk sikap dan nilai politik.
- f. Kontak-kontak politik langsung, meskipun pandangan terhadap sistem politik yang ditanamkan dikeluarga atau sekolah begitu positif, namun bila jika kenyataannya dalam masyarakat berbeda dan cenderung negatif, seperti adanya diskriminasi oleh partai dan pemerintah, adanya kesenjangan ekonomi dan sebagainya, maka pandangan terhadap dunia politik sangat mungkin berubah. Artinya kontak langsung dengan pemerintah, lembaga politik, dan kehidupan politik sangat mempengaruhi sikap dan perilaku politik individu dan kelompok untuk mendukung atau tidak, setia atau tidak terhadap sistem politik, pemerintah, atau partai politik yang semula didukungnya.

Sosialisasi politik berawal dari proses sosialisasi yang berjalan seumur hidup, terutama dalam masa kanak-kanak. Ia berkembang melalui keluarga, sekolah, *peer group*, tempat kerja, pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan, dan partai politik. Ia juga menjadi penghubung yang mensosialisasikan nilai-nilai politik generasi yang satu ke generasi yang lain.

Pengertian sosialisasi banyak disampaikan oleh para ahli antara lain yaitu menurut pandangan Kimball Young (dalam Gunawan, 2000:

33), sosialisasi ialah hubungan interaktif yang dengannya seseorang mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural yang menjadikan seseorang sebagai anggota masyarakat. Pendapat dua ahli tersebut sama-sama menyatakan bahwa sosialisasi merupakan proses individu menjadi anggota masyarakat. Pendapat tentang pengertian sosialisasi juga disampaikan oleh Gunawan (2000: 33) yang menyatakan bahwa sosialisasi dalam arti sempit merupakan proses bayi atau anak menempatkan dirinya dalam cara atau ragam budaya masyarakatnya (tuntutan-tuntutan sosiokultural keluarga dan kelompok-kelompok lainnya). Berdasarkan pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa sosialisasi adalah proses individu dalam mempelajari keperluan-keperluan sosial dan kultural di sekitarnya yang mengarah ke dunia sosial.

a. Faktor Yang Mempengaruhi Proses Sosialisasi

Individu akan berkembang menjadi makhluk sosial melalui proses sosialisasi. Dengan proses sosialisasi individu berkembang menjadi suatu pribadi atau makhluk sosial. Pribadi atau makhluk sosial ini merupakan kesatuan integral dari sifat-sifat individu yang berkembang melalui proses sosialisasi, sifat mana yang mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dalam masyarakat.

Proses perkembangan manusia sebagai makhluk sosial atau kepribadian itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Dalam proses ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Menurut F.G. Robbins (dalam Ahmadi, 2004: 158), ada lima faktor yaitu:

- 1) Sifat dasar, yaitu merupakan keseluruhan potensi-potensi yang diwarisi oleh seseorang dari ayah dan ibunya. Sifat dasar yang masih merupakan potensi-potensi itu berkembang menjadi aktualisasi karena pengaruh faktor-faktor lain.
- 2) Lingkungan prenatal, yaitu lingkungan dalam kandungan ibu. Dalam periode ini individu mendapatkan pengaruh-pengaruh tidak langsung dari ibu, misal beberapa jenis penyakit (diabetes, kanker, sifilis) berpengaruh secara tidak langsung terhadap pertumbuhan mental, penglihatan, pendengaran anak dalam kandungan.
- 3) Perbedaan individual, meliputi perbedaan dalam ciri-ciri fisik (bentuk badan, warna kulit, warna mata, dan lain-lain), ciri-ciri fisiologis (berfungsinya sistem endokrin), ciri-ciri mental dan emosional, ciri personal dan sosial.
- 4) Lingkungan, kondisi-kondisi disekitar individu yang mempengaruhi proses sosialisasinya, seperti:
 - a) Lingkungan alam, yaitu keadaan tanah, iklim flora dan fauna di sekitar individu.
 - b) Kebudayaan, yaitu cara hidup masyarakat tempat individu itu hidup, kebudayaan ini mempunyai aspek material (rumah perlengkapan hidup, hasil-hasil teknologi lainnya) dan aspek non material (nilai-nilai, pandangan hidup, adat istiadat dan sebagainya).

- c) Manusia lain dan masyarakat di sekitar individu, pengaruh manusia lain dan masyarakat dapat memberi stimulasi atau membatasi proses sosialisasi.

Peranan kondisi-kondisi lingkungan itu tidak menentukan, melainkan sekedar membatasi dan mempengaruhi proses sosialisasi manusia.

- 5) Motivasi, yaitu kekuatan-kekuatan dari dalam diri individu yang menggerakkan individu untuk berbuat. Motivasi ini dibedakan menjadi dorongan dan kebutuhan. Dorongan adalah keadaan ketidakseimbangan dalam diri individu. Kebutuhan adalah dorongan yang telah ditentukan secara personal, sosial, dan kultural.

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosialisasi tersebut berasal dari luar dan dalam diri individu. Faktor yang berasal dari dalam diri individu yaitu sifat dasar, perbedaan individual, dan motivasi. Sedangkan faktor yang berasal dari luar individu yaitu lingkungan prenatal, dan lingkungan sekitar.

Pendapat para ahli di atas pada dasarnya sama, yaitu menyatakan bahwa kendala dalam proses sosialisasi meliputi adanya kesulitan komunikasi, pola kelakuan yang berbeda, dan akibat perubahan dalam masyarakat. Proses sosialisasi selain memiliki kendala juga memiliki pendukung. Gunawan (2000: 49) menyatakan bahwa sosialisasi yang sukses bila disertai dengan toleransi yang tulus, disiplin dan patuh terhadap norma-norma masyarakat, hormat-menghormati, dan harga-

menghargai. Dengan pendukung tersebut, proses sosialisasi dapat berjalan dengan baik.

Rush dan Phillip Althoff (2002: 37) berpendapat bahwa setiap keberhasilan suatu proses sosialisasi politik ditentukan oleh faktor lingkungan dan keterkaitan unsur-unsur yang mempengaruhinya. Proses keberhasilan sosialisasi politik ditentukan oleh beberapa hal.

- 1) Agen sosialisasi politik, yang terdiri dari keluarga, pendidikan, media massa, kelompok sebaya, kelompok kerja, kelompok agama. Selain itu keberadaan kelompok kepentingan dan organisasi kemasyarakatan memberi pengaruh sebagai agen sosialisasi politik terhadap partisipasi masyarakat.
- 2) Materi sosialisasi politik, yaitu pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap politik yang hidup di masyarakat.
- 3) Mekanisme sosialisasi politik, di bagi menjadi tiga yaitu, imitasi, instruksi, motivasi.
- 4) Pola sosialisasi politik proses yang terus berkesinambungan, untuk mengetahui proses sosialisasi, yang terdiri dari Badan atau instansi yang melakukan proses sosialisasi, hubungan antara badan atau instansi tersebut dalam melakukan proses sosialisasi.

Agen sosialisasi merupakan pemeran utama dalam keberhasilan proses sosialisasi politik untuk menyebarkan atau menanamkan nilai-nilai dan norma-norma yang terdapat dalam materi sosialisasi politik.

Keberhasilan tersebut ditentukan oleh mekanisme yang terencana dan digambarkan dalam pola proses sosialisasi yang baik. Apabila proses-proses tersebut dapat tersusun, maka penyebaran informasi mengenai materi sosialisasi politik dapat dengan tepat disampaikan ke sasaran sosialisasi.

Kegiatan sosialisasi ini tidak dijalankan sendirian oleh KPU, namun secara umum, semua lembaga politik berperan dalam sosialisasi politik, diantaranya adalah lembaga-lembaga negara, Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) di tingkat nasional, Panitia Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten/kota, dan terutama adalah partai-partai politik. Karena itu, KPU harus selalu menjalin komunikasi dengan berbagai instansi pemerintah maupun dengan partai-partai politik peserta pemilu.

Fungsi KPU dalam mensosialisasikan kegiatan Pemilu kepada masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat agar bersedia memberikan suaranya pada saat pemungutan suara. Hal ini sangat penting mengingat dalam setiap pelaksanaan pemungutan suara, masih banyak masyarakat yang memilih golput.

Dari data yang diperoleh dari KPU (www.kpu.semarangkab.go.id/ di unduh 15 Desember 2015), rekapitulasi daftar pemilih tetap (DPT) Pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati tahun 2005 sebesar 662.882, jumlah masyarakat yang berpartisipasi 402.890. rekapitulasi DPT pada tahun 2010 sebesar 735.418, jumlah masyarakat yang berpartisipasi 459.018. sedangkan pada tahun 2015 Dari 740.768 pemilih yang tercatat dalam daftar pemilih tetap (DPT) maupun DPT Tambahan (DPTb), sebanyak 519.127 pemilih datang ke TPS untuk menggunakan hak suaranya. Dapat dilihat bahwa setiap pemilihan dari tahun 2005, 2010, hingga 2015 jumlah pemilih memang terus meningkat, namun angka golput masih naik turun. Dari hal ini pentingnya KPU sebagai agen

sosialisasi untuk mengurangi jumlah angka golput secara langsung maupun tidak langsung.

Keberhasilan suatu sosialisasi politik merupakan keberhasilan suatu kondisi masyarakat, artinya bahwa keberhasilan dalam sosialisasi politik sangat tergantung pada kerjasama masyarakat itu sendiri dan kondisi sosial masyarakat. Elemen-elemen pembangun dan penggerak kehidupan politik, memberikan sumbangan sesuai dengan kapasitasnya terhadap terjadinya perubahan-perubahan yang terjadi dalam percaturan politik, terutama dalam upaya kepemilikan kekuasaan yang akan menjadi agen perubahan sistem yang ada. Kesemuanya itu dibangun untuk menciptakan dominasi satu kelompok atas kelompok yang lain, dominasi adalah hal yang tidak bisa dibagi secara merata, otomatis yang memilikinya adalah satu kelompok tertentu dan hal itu hanya bisa dicapai dengan kemenangan politik.

Menurut Nim (2015: 6) masalah terbesar dalam mengelola sebuah sosialisasi politik adalah soal ekonomi, karena ekonomi yang tidak memadai akan memperlambat kerja suatu lembaga baik itu KPU Kota nya maupun tingkatan yang lebih rendah seperti lurah dan RT. Dengan dana rendah semua alat untuk mengakses sosialisasi tidak akan tercapai. Maka dari itu dana yang memadai sangat diperlukan untuk menunjang sosialisasi politik yang lebih optimal.

Menurut Djuyandi (2014: 1208) Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari informan Komisioner KPU, bahwa sasaran sosialisasi

Pemilu antara lain pemilih pemula, perempuan, kalangan kampus, sekolah, organisasi masyarakat, partai politik, dan pemerintah daerah. Setelah KPU menetapkan sasaran itu kemudian KPU bersama-sama dengan panitia pemungutan suara (PPS) di tingkat kelurahan dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di tingkat kecamatan mengundang perwakilan berbagai kalangan masyarakat untuk mengikuti sosialisasi pemilu, perwakilan-perwakilan itulah yang kemudian diharapkan juga dapat membantu KPU dalam mensosialisasikan Pemilu dengan baik kepada masyarakat luas.

Proses yang melibatkan orang-orang baik dari generasi tua maupun dari generasi muda. Dari adanya partisipasi politik yang dianggap sebagai akibat dari sosialisasi politik. Namun partisipasi politik juga berpengaruh terhadap sosialisasi politik, tanpa partisipasi politik, sosialisasi politik tidak dapat berjalan. Dari sosialisasi politik dan partisipasi politik, keduanya berkaitan satu sama lain. Namun kedua konsep sosialisasi politik dan partisipasi politik juga sangat bergantung pada konsep komunikasi politik. Dimana komunikasi politik merupakan kunci keberhasilan bagi sosialisasi politik dan partisipasi politik.

5. Komunikasi Politik

Baik sosialisasi politik maupun partisipasi politik sangat tergantung dari komunikasi politik. Komunikasi politik merupakan kunci keberhasilan bagi sosialisasi politik dan partisipasi politik. Michael Rush dan Phillip Althoff (dalam Maran 2001: 158-159) mendefinisikan komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang

relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik. Proses ini terjadi dengan berkesinambungan dan juga mencakup pertukaran informasi antara individu-individu dengan kelompok-kelompoknya pada semua tingkatan. Komunikasi politik merupakan suatu elemen yang dinamis dan yang menentukan sosialisasi politik dan partisipasi politik. Pola-pola komunikasi politik-komunikasi pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang dikembangkan oleh suatu negara menentukan bentuk sosialisasi politik dan partisipasi politik yang terjadi di negara yang bersangkutan. Dalam hal ini komunikasi politik menentukan corak perilaku insan politik.

Dalam proses sosialisasi politik yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Semarang yang berkaitan dengan teori dari Lasswell yaitu sosialisasi yang berkaitan dengan ilmu komunikasi, substansi yang perlu dipahami adalah bagaimana melakukan komunikasi politik yang tepat dan efektif. Lasswell (dalam Hikmat 2011: 42) mengungkapkan model komunikasinya secara verbal dengan lima pertanyaan: *who (siapa sumbernya), says what (apa yang disampaikan), in which channel (melalui media apa), to whom (siapa sasaran), with what effect (apa pengaruhnya)*. Ketiga komponen dalam komunikasi lahir dari jawaban atas pertanyaan verbal Lasswell, *who* menunjukkan jawaban atas perlunya komunikator dalam proses komunikasi, *says what* menunjukkan pesan dan *to whom* mengarahkan pada harus adanya komunikan.

Dalam konteks sosialisasi pelaksanaan pemilu tersebut, tentunya siapa yang melakukan sosialisasi mengatakan apa, adalah tentang materi sosialisasi pemilu itu sendiri, yaitu semua benda atau bentuk lain yang memuat program, simbol-simbol, atau tanda yang berkaitan dengan informasi semua tahapan dan program pemilu yang disebar dan diketahui oleh masyarakat luas untuk keperluan pemilu yang bertujuan agar semua orang memahami/mengerti dan untuk mengajak orang berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilihan umum. “*Melalui Media Apa?*“, sosialisasi pemilu dilakukan dengan metode dan media, yaitu, metode dengan komunikasi tatap muka, melalui media massa dan mobilisasi sosial. Sedangkan media yang digunakan utamanya adalah media cetak, surat kabar, majalah dan media elektronik yaitu TV, radio, *cd room*, *slide*, internet, warnet, *call center (above the line)*. Media pendukung yaitu poster, brosur, spanduk, *banner*, baliho, stiker, *leaflet*, *folder*, *booklet (below the line)*. Media tradisional meliputi kesenian tradisional baik dalam bentuk nyanyian, tarian, sandiwara, sesuai dengan ciri keunikan daerah masing-masing. Pembuatan dan penggunaan media tersebut dilakukan dengan bekerjasama berbagai pihak seperti instansi pemerintah terkait, pemerintah daerah, LSM, ormas, stasiun TV, radio maupun media massa cetak Lasswell (dalam Hikmat 2011: 42).

Selanjutnya, “*Siapa Sasaran?*“, sasaran sosialisasi pemilu yaitu masyarakat umum (publik), remaja pemuda dan mahasiswa (pemilih pemula), perempuan, pengemuka pendapat, petani, buruh dan kelompok

pekerja lainnya, wartawan dan kelompok media lainnya, TNI/POLRI, partai politik, pengawas/pemantau pemilu, LSM dan pemilih dengan kebutuhan khusus (penyandang cacat, masyarakat terpinggirkan, penghuni lembaga pemasyarakatan, pedagang kaki lima dan kelompok lain yang sering terpinggirkan).

Yang terakhir yaitu, “*Apa Pengaruhnya ?*”, sosialisasi pemilu ditujukan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia, tentang tahapan dan program Pemilu, tentang beberapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dengan benar, meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya pemilih untuk berperan serta dalam setiap tahapan pemilu, meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu. Menurut Arifin (2011: 8) Komunikasi dan politik menjadi komunikasi politik, sebagaimana diuraikan di muka pada hakikatnya berpadu atau bertemu pada dua titik, yaitu pembicaraan dan pengaruh atau mempengaruhi. Dapat dikaitkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh KPU itu harus bisa menyampaikan pembicaraan yang jelas serta di mengerti masyarakat pada umumnya, serta bagaiman kelak KPU itu dapat mempengaruhi masyarakat untuk ikut berpartisipasi serta ikut memilih dalam Pilkada.

6. Teori Efektivitas

Dapat dipahami bahwa efektivitas merupakan sebuah patokan untuk membandingkan antara proses yang dilakukan dengan tujuan dan

sasaran yang dicapai. Suatu program dikatakan efektif apabila usaha atau tindakan yang dilakukan sesuai dengan hasil yang diharapkan. Efektivitas digunakan sebagai tolok ukur untuk membandingkan antara rencana dan proses yang dilakukan dengan hasil yang dicapai. Untuk itu, untuk menentukan suatu program dinyatakan efektif atau tidaknya perlu adanya kriteria atau ukuran-ukuran efektivitas.

Untuk mengukur seberapa jauh tingkat efektivitas dari sosialisasi Pilkada Langsung tahun 2015 oleh KPU Kabupaten Semarang. Maka penulis mengaitkannya dengan teori pengukuran efektivitas yang dikemukakan oleh Duncan (dalam Steers, 1985: 53) dimana terdapat 3 indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas yaitu :

a. Pencapaian Tujuan

Pencapaian adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pen-tahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor, yaitu: Kurun waktu, sasaran yang merupakan target kongkrit.

b. Integrasi

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dengan berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi menyangkut proses sosialisasi.

c. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Untuk itu digunakan tolak ukur proses pengadaan dan pengisian tenaga kerja.

Steers mengemukakan 5 (lima) kriteria dalam pengukuran efektivitas, yaitu Produktivitas, Kemampuan adaptasi kerja, Kepuasan kerja, Kemampuan berlaba, dan Pencarian sumber daya. Ukuran efektivitas yang dikemukakan Steers dapat dipahami bahwa suatu program atau kegiatan dapat diketahui keberhasilannya tidak hanya dari upaya pencapaian tujuannya semata, tetapi juga kemampuannya dalam menghasilkan laba atau keuntungan. Dari pendapat yang diungkapkan oleh Steers diketahui bahwa ukuran efektivitas dilihat dari segi finansial dan suasana dalam pekerjaan.

B. Kerangka Berpikir

Keberhasilan suatu sosialisasi politik merupakan keberhasilan suatu kondisi masyarakat, artinya bahwa keberhasilan dalam sosialisasi politik sangat tergantung pada kerjasama masyarakat itu sendiri dan kondisi sosial masyarakat. Dalam penelitian ini yang menjadi acuan penelitian berkaitan tentang sosialisasi Pilkada yang dilakukan oleh lembaga KPU Kabupaten Semarang yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menentukan pemimpin yang baik. Dengan sosialisasi ini tujuan lainnya juga berkaitan dengan menumbuhkan kesadaran politik masyarakat Indonesia, baik dari kalangan pemilih yang sudah tua, dewasa,

maupun pemilih pemula. Semua diharapkan untuk sadar akan politik karena politik sangatlah berpengaruh dalam merubah suatu negara. Dengan dilakukan sosialisasi yang tepat maka tujuan dalam meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat serta menimbulkan rasa akan sadar politik juga akan terwujud. Dengan itu maka akan terwujudlah suatu keabsahan pemilu yang pastinya akan menjadi lebih besar.

Adapun bagan kerangka berpikir untuk penelitian yang dipaparkan secara ringkas sebagai berikut :



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dari kegiatan sosialisasi KPU Kabupaten Semarang ada 2 sosialisasi yang dilakukan, yaitu sosialisasi pada masyarakat dan sosialisasi pada *stakeholder* terkait. Sosialisasi pada masyarakat ditujukan pada masyarakat seperti pemilih pemula, masyarakat desa, masyarakat difabilitas, lapas, dan masyarakat umum lainnya. Sosialisasi yang diberikan pada masyarakat ini berupa peringatan untuk masyarakat dalam memilih pada tanggal 9 Desember dan himbuan untuk datang ke TPS saat pemilihan berlangsung. Lalu sosialisasi pada *stakeholder* terkait seperti partai politik dan Pemda. *Stakeholder* terkait perannya sangat besar dalam memberikan sosialisasi. Dari partai politik diberikan sosialisasi mengenai tata cara kampanye, serta keaktifan partai politik dalam mengenalkan pasangan calonnya pada masyarakat. Sedangkan Pemerintah daerah membantu dalam mensosialisasikan Pemilu disela-sela kegiatan Pemerintah Daerah. KPU mensosialisasikan kewajiban Pemda dalam melancarkan pelaksanaan Pilkada. Sosialisasi sudah dimulai melalui kegiatan Rapat Koordinasi dan Pendidikan Politik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi melalui Badan Kesbang Pol dan Linmas serta Bakorwil dengan

melibatkan penyelenggara (KPU Provinsi Jateng dan KPU Kabupaten/Kota, serta aparat keamanan). KPU Kabupaten/Kota bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing melakukan persiapan dan sosialisasi melalui berbagai forum di tingkat Kabupaten/Kota. Dari sosialisasi dengan *stakeholder* terkait antara parpol dan Pemda semua bertujuan untuk membantu memperluas kegiatan KPU Kabupaten Semarang dalam melakukan sosialisasi pada masyarakat.

2. Kendala yang dialami KPU antara lain dana yang terbatas karena dana tersebut tidak dianggarkan dan juga luas wilayah yang berkaitan dengan infrastruktur jalan serta kondisi wilayah yang kurang mendukung. Dana yang terbatas ini karena dari APBD tidak menganggarkan dana sosialisasi yang dilakukan untuk masyarakat, dana hanya di anggarkan untuk sosialisasi di lapas dan masyarakat difabilitas. Sedangkan luas wilayah ini berkaitan dengan sulitnya menjangkau daerah yang plosok dan terpencil, hal ini berkaitan dengan infrastruktur jalan yang ada di daerah yang belum memiliki akses jalan yang memadai.
3. Kefektifan KPU dalam melakukan sosialisasi yaitu dilihat dengan melakukan perbandingan data pemilih Pilkada dari tahun-tahun sebelumnya bahwa tingkat partisipasi mengalami peningkatan dari jumlah suara yang disumbangkan oleh masyarakat. Walaupun sosialisasi sebenarnya bukan faktor utama dalam meningkatkan

partisipasi masyarakat dalam Pilkada, faktor lain yang meningkatkan partisipasi masyarakat dalam Pilkada tahun 2015, yaitu adanya calon *incumbent*. Peluang *incumbent* untuk menjadi pemenang dalam setiap pilkada memang memberi ruang yang besar. Namun dalam setiap melakukan sosialisasi KPU sudah menjelaskan pada masyarakat untuk menentukan pilihannya berdasarkan atas pilihan dan pengetahuannya sendiri terhadap calon yang akan mereka pilih, bukan berdasarkan pilihan orang lain (ikut-ikutan) ataupun ada unsur paksaan dari orang lain. Disisi lain jumlah partisipasi yang meningkat juga tidak lepas dari kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPU. Sehingga tingkat keefektifan dari sosialisasi yang dilakukan oleh KPU setidaknya memberikan pengaruh dalam menciptakan masyarakat yang sadar untuk menggunakan hak pilihnya. Sedangkan keefektifan lainnya adalah sisa anggaran kegiatan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. KPU mampu menghemat dana serta waktu dalam melakukan kegiatan evaluasi seluruhnya. Karena sisa anggaran ini sangat bermanfaat bagi penambahan kas daerah. Dari kegiatan KPU Kabupaten Semarang dalam memberikan sosialisasi, ada kegiatan berkaitan lainnya yang dilakukan dengan meminimalisir pengeluaran dana serta mengefektifkan waktu yang ada. Jadi sisa dana dari kegiatan pemilihan Bupati ini juga dimasukan dalam keefektifan penggunaan anggaran.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah, berkaitan dengan kendala yang dialami KPU Kabupaten Semarang mengenai dana anggaran, KPU harus mengusulkan pada Pemerintah Daerah dana tambahan sosialisasi untuk masyarakat. Dimana dana itu tidak hanya dianggarkan untuk lapas dan masyarakat difabilitas saja, namun bisa dianggarkan untuk masyarakat lebih luas, seperti pemilih pemula, maupun masyarakat desa yang terpencil. Karena dilihat dari sisa anggaran kegiatan sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Semarang mencapai Rp 5.473.632.609 dan dikembalikan ke kas daerah sebesar Rp 5.273.202.579,- jumlah yang terbilang masih besar jika diberikan untuk dianggarkan pada kegiatan sosialisasi yang lebih banyak pada masyarakat luas.
2. Kepada masyarakat, semua pilihan bergantung pada pilihan rakyat, baik buruknya juga tergantung pada pilihan rakyat. Masyarakat diharapkan lebih peduli pada masa depan daerahnya, dengan cara salah satunya memilih pemimpin daerah yang berkualitas. Tidak pedulinya masyarakat pada saat memilih kepala daerahnya dengan cara tidak mencoblos atau memilih hanya berdasarkan ikut-ikutan saja. Hal ini harus segera dihilangkan dari kebiasaan masyarakat, dengan cara masyarakat itu mau mencari tahu bagaimana *track record* dan profil

dari pemimpin yang akan dipilihnya. Salah satunya mengikuti sosialisasi Pilkada serta secara aktif mencari tahu bagaimana pemimpin yang akan dipilihnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Ahmadi, Abu. 2007. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- 2004. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arifin, Anwar. 2010. *Opini Publik*. Jakarta: Gramata.
- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Arisandi, Herman. 2015. *Buku Pintar Pemikiran Tokoh-Tokoh Sosiologi*. Yogyakarta: IRCiSodD.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Gaffar, Janedjri M. 2012. *Politik Hukum Pemilu*. Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).
- Gunawan, Ary H. 2000. *Sosiologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hikmat, Mahi M. 2011. *Komunikasi Politik*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Hoesein, Zainal Arifin dan Rahman Yasin. 2015. *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*. Jakarta: LP2AB.
- Hollyson, Rahmat dan Sri Sundari. 2015. *Pilkada Penuh Euforia, Miskin Makna*. Jakarta: Bestari.
- KPU. 2015. *Laporan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2015*. Kabupaten Semarang: KPU.
- Maran, Rafael Raga. 2001. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moleong, L.J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nimmo, Dan. 2000. *Komunikasi Politik (Khalayak dan Efek)*. Bandung: Remadja Posdakarya.

- Prihatmoko, J. Joko. 2003. *Pemilu 2004 dan Konsolidasi Demokrasi*. LP2I Press: Semarang.
- Rush, Michael dan Philip Althoff. 2002. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sahid, Komarudin. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Steers, Richard M. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Erlangga: Jakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-undang Pemilukada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Jurnal

- Djuyandi, Y. 2014. *Efektivitas Sosialisasi Politik Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014 Oleh Komisi Pemilihan Umum*. *Humaniora*. Vol-5(No.2). Hal 1208.
- Nim, E. 2015. *Pelaksanaan Fungsi Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 (Studi diKelurahan Darat Sekip Kota Pontianak Provinsi Kalimantan Barat)*. *Aspirasi, Jurnal Ilmu Politik*. Vol-3(No. 4). Hal 6.

Internet

- Arief. 2015. *Tujuan Pilkada Serentak Untuk Terciptanya Efektivitas dan Efisiensi Anggaran*. (<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/3829/Arief-Tujuan-Pilkada-Serentak-Untuk-Terciptanya-Efektivitas-dan-Efisiensi-Anggaran/berita>). Di unduh: 15 Desember 2015
- Jateng, Tribun. 2015. *Angka Partisipasi di Kabupaten Semarang 70 Persen*. (<http://jateng.tribunnews.com/2015/12/16/angka-partisipasi-di-kabupaten-semarang-70-persen>). Di unduh: 16 Desember 2015
- KPU. 2013. *Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada)*. <http://www.kpu-tangerangkota.go.id/p/pemilihan-umum-kepala-daerah-dan-wakil.html>. Di unduh: 13 Desember 2015

Maswadi, Rauf. 2008. *Verifikasi Parpol demi Efisiensi Pemilu*. (www.suarakarya-online.com/di unduh: 14 Desember 2015)

Republika. 2015. *KPU Sebut Masyarakat Sudah Dewasa Berpolitik*. (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/pilkada/15/12/14/nzct1v335-kpu-sebut-masyarakat-sudah-dewasa-berpolitik>). Di unduh: 15 Desember 2015

